



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA  
JL. MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,  
3506129, 3506145,  
3506143, 3862220

FAX. : (021) 3507202, 3506129,  
3506145, 3506143, 3862179  
email : ditjenhubdat@dephub.go.id  
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

Nomor : UM.207/42/20/DRJD/2024  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : 1 (Satu) berkas  
Hal : Undangan

Jakarta, 03 Juli 2024

Yth. (Daftar Terlampir)

Dalam rangka peningkatan pelayanan dalam penyelenggaraan transportasi darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Perhubungan Darat Seluruh Indonesia Tahun 2024 secara luring (*offline*) dan daring (*online*) dengan tema "**Sinergitas Kebijakan untuk Mewujudkan Transportasi Darat yang Berintegritas dan Berkkeselamatan**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon dengan hormat kepada Saudara untuk dapat hadir secara luring (*offline*) dalam acara Rakornis dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa – Kamis / 09 – 11 Juli 2024  
Waktu : (Jadwal acara sebagaimana terlampir)  
Tempat : Kempinski Grand Ballroom  
Grand Indonesia West Mall, Jl. Kebon Kacang Raya Blok D6, Kb. Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10230

**Catatan:**

1. Pakaian : Pakaian Dinas Harian (PDH);
2. Biaya akomodasi, biaya harian dan biaya transportasi ditanggung oleh masing - masing;
3. Jumlah peserta yang dapat masuk ke dalam venue hanya **1 orang tiap unit kerja**;
4. Dimohon untuk registrasi kehadiran melalui tautan berikut:  
<https://linktr.ee/RakornisHubdat2024> paling lambat **Senin, 08 Juli 2024** dan wajib melakukan **pengambilan akses masuk venue** sesuai jadwal terlampir;
5. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi melalui sms/wa ke nomor HP. 0813-7769-1085 (a.n. Mona Khoirunnisah) dan 0812-8621-2373 (a.n. Ayu Verantika).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal Perhubungan Darat,

Ijen Pol. Risyapudin Nursin, S.I.K.  
NRP. 66110433

Tembusan:  
Menteri Perhubungan

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

1. Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh;
2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Langsa;
3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe;
4. Kepala Dinas Perhubungan Kota Sabang;
5. Kepala Dinas Perhubungan Kota Subulussalam;
6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar

Provinsi Sumatera Utara

7. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan;
8. Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai;
9. Kepala Dinas Perhubungan Kota Gunung Sitoli;
10. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi;
11. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nias;
12. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Barat;

Provinsi Sumatera Barat

13. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang;
14. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padangpanjang;
15. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pariaman;
16. Kepala Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh;
17. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi;
18. Kepala Dinas Perhubungan Kota Solok;

Provinsi Sumatera Selatan

19. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang;
20. Kepala Dinas Perhubungan Kota Lubuklinggau;
21. Kepala Dinas Perhubungan Kota Prabumulih;
22. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
23. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir;
24. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim;
25. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin;
26. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
27. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
28. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
29. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lahat;
30. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas;
31. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin;
32. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Empat Lawang;
33. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Provinsi Riau

34. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru;
35. Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai;
36. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Siak;
37. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir;

38. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu;
39. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar;

Provinsi Kepulauan Riau

40. Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam;
41. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang;
42. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan;
43. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna;
44. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Anambas;
45. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun;

Provinsi Jambi

46. Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi;
47. Kepala Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh;
48. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Muaro Jambi;
49. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun;
50. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo;
51. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci;

Provinsi Bengkulu

52. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bengkulu;
53. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Utara;
54. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Selatan;
55. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepahiang;
56. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seluma;
57. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;

Provinsi Bangka Belitung

58. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang;
59. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka;
60. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Barat;
61. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah;
62. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung;
63. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur;

Provinsi Lampung

64. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung;
65. Kepala Dinas Perhubungan Kota Metro;
66. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanggamus;
67. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pringsewu;
68. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang;
69. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
70. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah;
71. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara;
72. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan;
73. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur;
74. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat;

75. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mesuji;
76. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan;
77. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Barat;
78. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran;

Provinsi Banten

79. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon;
80. Kepala Dinas Perhubungan Kota Serang;
81. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang;
82. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan.
83. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak;
84. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang;
85. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Serang;
86. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang;

Provinsi Jawa Barat

87. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
88. Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjar;
89. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi;
90. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor;
91. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cimahi;
92. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon;
93. Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok;
94. Kepala Dinas Perhubungan Kota Sukabumi;
95. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya
96. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung;
97. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat;
98. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi;
99. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor;
100. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis;
101. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur;
102. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon;
103. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Garut;
104. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu;
105. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang;
106. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan;
107. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka;
108. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran;
109. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta;
110. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Subang;
111. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi;
112. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang;
113. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya;

Provinsi Jawa Tengah

114. Kepala Dinas Perhubungan Kota Magelang;
115. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekalongan;

116. Kepala Dinas Perhubungan Kota Salatiga;
117. Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang;
118. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta;
119. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tegal.
120. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara;
121. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas;
122. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batang;
123. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Blora;
124. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali;
125. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes;
126. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap;
127. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Demak;
128. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan;
129. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara;
130. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar;
131. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen;
132. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal;
133. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten;
134. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus;
135. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang;
136. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pati;
137. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan;
138. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang;
139. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga;
140. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo;
141. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang;
142. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang;
143. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen;
144. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo;
145. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal;
146. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung;
147. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri;
148. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Wonosobo;

#### Provinsi Jawa Timur

149. Kepala Dinas Perhubungan Kota Batu;
150. Kepala Dinas Perhubungan Kota Blitar;
151. Kepala Dinas Perhubungan Kota Kediri;
152. Kepala Dinas Perhubungan Kota Madiun;
153. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang;
154. Kepala Dinas Perhubungan Kota Mojokerto;
155. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pasuruan;
156. Kepala Dinas Perhubungan Kota Probolinggo;
157. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya;
158. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan;
159. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi;
160. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar;

161. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro;
162. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bondowoso;
163. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik;
164. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember;
165. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang;
166. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri;
167. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan;
168. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang;
169. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun;
170. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan;
171. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malang;
172. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mojokerto;
173. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk;
174. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi;
175. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan;
176. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pamekasan;
177. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan;
178. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo;
179. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo;
180. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang;
181. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
182. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo;
183. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep;
184. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek;
185. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban;
186. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung;

#### Provinsi DKI Jakarta

187. Kepala Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
188. Kepala Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat;
189. Kepala Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
190. Kepala Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur;
191. Kepala Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara;

#### Provinsi D.I.Yogyakarta

192. Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta;
193. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;
194. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul;
195. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo;
196. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman;

#### Provinsi Bali

197. Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar;
198. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Badung;
199. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar;
200. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan;
201. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jembrana;

202. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem;
203. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung;
204. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangli;
205. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng;

**Provinsi Nusa Tenggara Barat**

206. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bima;
207. Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram;
208. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bima;
209. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu;
210. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat;
211. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah;
212. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur;
213. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara;
214. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa;
215. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Barat;

**Provinsi Nusa Tenggara Timur**

216. Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang;
217. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Alor;
218. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
219. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sabu Raijua;
220. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang;
221. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai;

**Provinsi Kalimantan Barat**

222. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak;
223. Kepala Dinas Perhubungan Kota Singkawang;
224. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya;
225. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mempawah;
226. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas;
227. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang;

**Provinsi Kalimantan Selatan**

228. Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin;
229. Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru;
230. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar;
231. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala;
232. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong;
233. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut;

**Provinsi Kalimantan Tengah**

234. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya;
235. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau;
236. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat;
237. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur;
238. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gunung Mas;

239. Kepala Dinas Perhubungan Kapuas;

Provinsi Kalimantan Timur

- 240. Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda;
- 241. Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan;
- 242. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bontang;
- 243. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Paser;
- 244. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara;
- 245. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara;

Provinsi Kalimantan Utara

- 246. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tarakan;
- 247. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan;
- 248. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau;
- 249. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan;
- 250. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Tidung;

Provinsi Sulawesi Utara

- 251. Kepala Dinas Perhubungan Kota Manado;
- 252. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bitung;
- 253. Kepala Dinas Perhubungan Kota Kotamogabu;
- 254. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tomohon;
- 255. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa;
- 256. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Provinsi Gorontalo

- 257. Kepala Dinas Perhubungan Kota Gorontalo;
- 258. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Boalemo;
- 259. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Bolango;
- 260. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo;
- 261. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo Utara;
- 262. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato;

Provinsi Sulawesi Selatan

- 263. Kepala Dinas Perhubungan Kota Makasar;
- 264. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palopo;
- 265. Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare;
- 266. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar;
- 267. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantaeng;

Provinsi Sulawesi Tenggara

- 268. Kepala Dinas Perhubungan Kota Kendari;
- 269. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bau-bau;
- 270. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kolaka Utara;
- 271. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe;
- 272. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Wakatobi;

**Provinsi Sulawesi Tengah**

- 273. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu;
- 274. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Poso;
- 275. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sigi;
- 276. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali;
- 277. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Donggala;
- 278. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Toli-toli;

**Provinsi Sulawesi Barat**

- 279. Kepala Dinas Perhubungan Kota Mamuju;
- 280. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara;
- 281. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majene;
- 282. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar;
- 283. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mamasa;
- 284. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah;

**Provinsi Maluku**

- 285. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon;
- 286. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tual;
- 287. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat;
- 288. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buru;
- 289. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Aru;

**Provinsi Maluku Utara**

- 290. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ternate;
- 291. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan;
- 292. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulau Morotai;
- 293. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula;
- 294. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Barat;

**Provinsi Papua**

- 295. Kepala Dinas Perhubungan Kota Jayapura
- 296. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Supiori;
- 297. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor;
- 298. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Yapen;
- 299. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura;

**Provinsi Papua Barat**

- 300. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manokwari;
- 301. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni;
- 302. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Wondama;
- 303. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaimana;
- 304. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Fak-fak;

**Provinsi Papua Pegunungan**

- 305. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nduga;
- 306. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya;

- 307. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tolikara;
- 308. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lanny Jaya;
- 309. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yakuhamo;

**Provinsi Papua Selatan**

- 310. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Asmat;
- 311. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mappi;
- 312. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke;
- 313. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel;

**Provinsi Papua Tengah**

- 314. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nabire;
- 315. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Paniai;
- 316. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika;
- 317. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Puncak Jaya;
- 318. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Puncak;

**Papua Barat Daya**

- 319. Kepala Dinas Perhubungan Kota Sorong;
- 320. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Raja Ampat;
- 321. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong;
- 322. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong Selatan;
- 323. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Maybrat.



Direktur Jenderal Perhubungan Darat,

Irjen Pol. Risyapudin Nursin, S.I.K.  
NRP. 66110433

**RUNDOWN RAKORNIS BIDANG PERHUBUNGAN DARAT**  
**TAHUN 2024**  
**(KEMPINSKI GRAND BALLROOM, JAKARTA)**

HARI SELASA, 09 JULI 2024

NO	DURASI	WAKTU	KETERANGAN	LOKASI
1.	420'	09.00 – 16.00	Pengambilan Akses Venue & Seminar Kit	Lobby Kempinski Grand Ballroom

HARI RABU, 10 JULI 2024

NO	DURASI	WAKTU	KETERANGAN
1.	90'	07.00 – 08.30	Registrasi Peserta
2.	30'	08.30 – 09.00	Clear Area
3.	10'	09.00 – 09.10	Tari Pembuka
4.	5'	09.10 – 09.15	Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya & Mars Perhubungan
5.	5'	09.15 – 09.20	Do'a
6.	5'	09.20 – 09.25	Pembukaan & Video Profil Ditjen Hubdat
7.	10'	09.25 – 09.35	<b>Sambutan Rakornis 2024 Oleh Menteri Perhubungan</b>
8.	15'	09.35 – 09.35	Penyerahan Penghargaan: Instansi Yang Berperan Aktif Dalam Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2024/1445 H
9.	15'	09.50 – 10.00	<b>Pengarahan dan Pembukaan Rakornis 2024 oleh Wakil Presiden/ Menteri Perhubungan</b>
10.	10'	10.00 – 10.10	Foto bersama
11.	90'	10.10 – 11.15	<b>Panel 1</b>
12.	10-15'		1. Kemenkeu (Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Rangka Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat)
13.	10-15'		2. BPK (Tata Kelola Keuangan Negara Yang Berkualitas dan Bermanfaat);
14.	10-15'		3. KPK (Pembentukan Budaya Anti Korupsi Melalui Pembinaan, Pendidikan dan Sosialisasi Anti Korupsi);
15.	10-15'		4. KEJAKSAAN AGUNG (Pendampingan Hukum dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Darat);
16.	30'	11.15 – 11.45	Tanya Jawab
17.	75'	11.45 – 13.00	Ishoma
18.	15'	13.00 – 13.15	Fun Games
19.	90'	13.15 – 14.15	<b>Panel 2</b>
20.	10-15'		1. Bappenas (Rencana Aksi Keselamatan Daerah Mendukung Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat);
21.	10-15'		2. Korlantas (Kolaborasi dan Sinergitas Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
22.	10-15'		3. Bina Marga, Kemenpupr (Jalan Yang Berkeselamatan Melalui Pemeringkatan Bintang);
23.	10-15'		4. Kemendagri, (Upaya Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah);
24.	30'	14.15 – 14.45	Tanya Jawab
25.	5'	14.45 – 14.50	Penutupan
26.	60'	14.50 – 15.50	Hiburan (Live Music)



HARI KAMIS, 11 JULI 2024

NO	DURASI	WAKTU	KETERANGAN
1.	5'	09.00 – 09.05	Pembukaan MC
2.	15'	09.05 – 09.20	<p>Penyerahan Penghargaan Pemerintah Daerah/Instansi/Unit Kerja Yang Optimal Dalam Penyelenggaraan Bidang Transportasi Darat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemda Yang Melaksanakan Pengalihan Pengelolaan Pengembangan Angkutan Perkotaan Skema BTS;</li> <li>2. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) Terbaik;</li> <li>3. Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Terbaik;</li> <li>4. Terminal Tipe A Terbaik;</li> <li>5. Pelabuhan Penyeberangan Terbaik;</li> <li>6. Balai Pengelola Transportasi Darat Terbaik.</li> </ol>
3.	10'	09.20 – 09.30	Penyematan <i>Brand Ambassador</i> Ditjen Hubdat
4.	20'	09.30 – 09.50	<b>Pengarahan Oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat</b>
5.	120'	09.50 – 11.20	<b>Panel 1</b>
6.	10-15'		<b>1. Sesditjen Hubdat</b> (Pengenalan dan Sosialisasi Aplikasi MitraDarat)
7.	10-15'		<b>2. Dir. Sarana Transportasi Jalan</b> (Optimalisasi Pelayanan Uji Berkala Dan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum Di Daerah Dalam Rangka Upaya Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan)
8.	10-15'		<b>3. Dir. Prasarana Transportasi Jalan</b> (Optimalisasi Fungsi Terminal Dalam Pengawasan Keselamatan Angkutan Jalan)
9.	10-15'		<b>4. Dir. Lalu Lintas Jalan</b> (Peningkatan Peran PPNS Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)
10.	10-15'		<b>5. Dir. Angkutan Jalan</b> (Pembinaan Penyelenggaraan Angkutan Jalan Yang Berkeselamatan)
11.	10-15'		<b>6. Dir. Transportasi Sungai, Danau Dan Penyeberangan</b> (Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran)
12.	30'	11.20 – 11.50	Tanya Jawab
13.	15'	11.50 – 12.05	<i>Fun Games</i>
14.	10'	12.05 – 12.15	<b>Laporan Akhir Kegiatan Oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat</b>
15.	10'	12.15 – 12.20	Foto Bersama
16.	5'	12.20 – 12.50	Penutupan Oleh MC
17.	30'	12.50 – 13.20	Makan Siang

